

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun yakni tahun 2025. Dokumen ini diharapkan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh aparatur pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya nanti memiliki kompetensi, nilai kerja dan rasa kebersamaan untuk menuju sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini tidak lepas dari kekurangan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaannya. Besar harapan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik guna meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di sektor perdagangan dan perindustrian

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Rantauprapat, 8 July 2025

Kepala Dinas
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Labuhanbatu

Chairuddin Nasution, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197207181993081001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI II
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU... 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 20
2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 24
2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD 25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.. 34

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 35
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 36
3.3. Program dan Kegiatan..... 37

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 41

BAB V PENUTUP 50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025.	8
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
Tabel 2.3.	Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan tahun 2025...	26
Tabel 2.4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan	34
Tabel 3.1.	Sasaran Perangkat Daerah	37
Tabel 4.1.	Perubahan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	42

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, guna mengakomodasi perkembangan dan dinamika kebijakan, kondisi aktual, serta hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan. Dokumen ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah tetap relevan, efektif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, baik dari aspek kebijakan nasional, regional, maupun lokal. Proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui tahapan yang sistematis, meliputi identifikasi perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan, analisis capaian kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, serta penyesuaian terhadap kemampuan riil pendanaan. Penyusunan dokumen ini juga mempertimbangkan masukan dari hasil Musrenbang, Forum Perangkat Daerah, serta koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) untuk penyesuaian perencanaan tahunan. Disamping Undang-undang di atas perubahan Renja juga didasarkan adanya perubahan peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2025 ini ada sejumlah aturan yang membuat perubahan besar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah disebabkan adanya perubahan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain:

a. Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;

c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025;

Adanya kebijakan di atas membuat seluruh daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu harus melakukan efisiensi dengan melakukan pengurangan, penyesuaian dan perubahan pada belanja yang tidak prioritas dan belanja yang hanya bersifat pendukung. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan langkah-langkah percepatan perubahan RKPD Tahun 2025, dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rangka mensinergikan Asta Cita yang merupakan misi Presiden terpilih ke dalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2025 sehingga berimbas kepada percepatan penyusunan perubahan Renja Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 ini didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Acara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
8. Rancangan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu 2025 – 2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen Renja tahun berjalan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, perkembangan kondisi aktual, serta perubahan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah. Dokumen ini disusun agar perangkat daerah memiliki pedoman pelaksanaan kegiatan yang lebih responsif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan terkini.

Sedangkan tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 adalah :

1. Menyesuaikan program dan kegiatan tahun berjalan dengan perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan yang terjadi di tingkat nasional, regional, dan lokal.
2. Mengakomodasi hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan hingga pertengahan tahun (Triwulan II) untuk meningkatkan efektivitas capaian kinerja perangkat daerah.
3. Menjamin keterpaduan dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan tahunan (Renja) dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Perubahan RKPD, Renstra PD, RPJMD, serta Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota.
4. Memberikan dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD (RPAPBD), agar alokasi anggaran dapat diarahkan pada kegiatan prioritas yang telah disesuaikan.
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui perencanaan yang berbasis data dan evaluasi kinerja

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN
   - 1.1. Latar Belakang
   - 1.2. Landasan Hukum
   - 1.3. Maksud dan Tujuan
   - 1.4. Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
   - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
   - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat diukur melalui Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menggambarkan secara ringkas dan menyeluruh capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kinerja sendiri diartikan sebagai keluaran atau hasil dari pelaksanaan kegiatan atau program yang telah atau akan dicapai, terkait dengan penggunaan anggaran yang terukur dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Value for Money, yang menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam penggunaan sumber daya. Pendekatan ini membutuhkan sejumlah indikator sebagai alat ukur, yaitu:

a. Indikator Masukan (Input): Mengukur jumlah sumber daya yang digunakan untuk suatu kegiatan, seperti anggaran (dana), sumber daya manusia (SDM), peralatan, material, dan masukan lainnya. Analisis terhadap distribusi input ini berguna untuk menilai kesesuaian alokasi sumber daya dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.
b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
c. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2025, capaian Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat Daerah) s.d tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) / 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) / 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai AKIP OPD**	**70**		**60**	**68**	**66**	**97**	**70**	**93,33**	**93,33**
2.07.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	15	dokumen	6	0	0	0	0	6	40,00
2.07.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dokumen	6	0	0	0	0	6	60,00
2.07.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	laporan	0	0	0	0	4	4	66,67
2.07.01. 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.07.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360	orang/bulan	226	32	32	100	32	290	80,56

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat Daerah) s.d tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) / 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) / 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	6	2	2	100	2	10	83,33
2.07.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dokumen	0	0	0	0	0	0	0,00
2.07.01. 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah**	**100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.07.01. 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6		3	1	1	100	1	5	83,33
2.07.01. 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.07.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6	paket	4	0	0	0	0	4	66,67
2.07.01. 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250	orang	100	0	0	0	100	200	80,00

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat Daerah) s.d tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) / 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) / 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	orang	25	0	0	0	0	25	50,00
2.07.01. 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.07.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	paket	4	1	1	100	1	6	85,71
2.07.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	paket	4	1	1	100	1	6	85,71
2.07.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	paket	4	1	1	100	1	6	85,71
2.07.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	paket	4	1	1	100	1	6	85,71
2.07.01. 2.06.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18	laporan	10	1	1	100	1	12	66,67
2.07.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	laporan	15	5	5	100	5	25	83,33

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat Daerah) s.d tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) / 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) / 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.01. 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**50**		**15**	**5**	**5**	**100**	**5**	**25**	**50**
2.07.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	paket	1	0	0	0	0	1	100,00
2.07.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	unit	0	0	0	0	0	0	0,00
2.07.01. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.07.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	laporan	48	12	12	100	12	72	100,00
2.07.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	laporan	48	12	12	100	12	72	100,00
2.07.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	laporan	4	1	1	100	1	6	100,00

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat Daerah) s.d tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) / 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) / 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.01. 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.07.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90	unit	60	15	15	100	15	90	100,00
2.07.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	unit	0	0	0	0	0	0	0,00
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pasar rakyat meningkat kualitasnya**	**80**	**%**	**50**	**10**	**10**	**100**	**10**	**70**	**87,5**
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase sarana dan prasarana pasar rakyat yang baik dan representatif**	**75**	**%**	**45**	**10**	**10**	**100**	**10**	**65**	**86,67**
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2	unit	0	0	0	0	0	0	0,00
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	11	unit	4	1	1	100	1	6	54,55

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat Daerah) s.d tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) / 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) / 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	**Tingkat kepatuhan pedagang dan pengelola pasar rakyat terhadap standar operasional pengelolaan pasar dan regulasi perdagangan**	**80**	**%**	**70**	**15**	**15**	**100**	**25**	**110**	**137,50**
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	30	dokumen	20	5	5	100	5	30	100,00
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**persentase fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dalam periode tertentu**	**5**	**%**	**4**	**5**	**4**	**80**	**5**	**4,33**	**86,67**
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota**	**indeks perubahan harga barang kebutuhan pokok**	**5**	**%**	**4**	**5**	**4**	**80**	**5**	**4,33**	**86,67**
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	30	laporan	20	5	5	100	5	30	100,00

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat Daerah) s.d tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) / 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) / 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyimpangan atau pelanggaran atas ketersediaan, distribusi dan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi yang terdeteksi dan ditindaklanjuti**	**100 %**	**80**	**20**	**20**	**100**	**20**	**120**	**120,00**
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	30 laporan	20	5	5	100	5	30	100,00
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase peningkatan nilai ekspor produk unggulan daerah yang dipromosikan**	**50 %**	**21**	**10**	**6**	**60**	**10**	**37**	**74,00**

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat Daerah) s.d tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) / 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) / 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/kota**	**Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam kegiatan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan**	**250**	**pelaku usaha**	**175**	**45**	**40**	**89**	**45**	**260**	**104,00**
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	150	pelaku usaha	80	20	20	100	20	120	80,00
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	200	pelaku usaha	100	25	25	100	25	150	75,00
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase pelaku usaha yang sudah tertib ukur**	**100**	**%**	**80**	**20**	**20**	**100**	**20**	**120**	**120,00**
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Persentase temuan penyimpangan atau pelanggaran atas penggunaan alat ukur takaran timbangan dan perlengkapan ukur yang tidak memenuhi standar yang ditindaklanjuti**	**100**	**%**	**80**	**20**	**20**	**100**	**20**	**120**	**120,00**
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	6000	unit	3108	500	758	152	500	4366	72,77

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat Daerah) s.d tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) / 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) / 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.06.2.01.02	Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	350	pelaku usaha	180	50	50	100	50	280	80,00
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri**	**100**	**%**	**80**	**20**	**20**	**100**	**20**	**120**	**120,00**
3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**persentase peningkatan penjualan produk lokal unggulan daerah yang dipromosikan**	**50**	**%**	**21**	**10**	**6**	**60**	**10**	**37**	**74,00**
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	200	UMKM	90	30	30	100	30	150	75,00
3.31.02.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase peningkatan industri kecil dan menengah yang produktif**	**50**	**%**	**21**	**10**	**6**	**60**	**10**	**37**	**74,00**
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**28**	**dokumen**	**21**	**5**	**5**	**100**	**6**	**32**	**114,2857143**
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	3	dokumen	1	0	0	0	1	2	66,67

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat Daerah) s.d tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) / 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) / 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.02.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	40	dokumen	20	5	5	100	5	30	75,00
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	**Persentase industri yang memiliki izin usaha yang sah**	**80**	**%**	**55**	**20**	**15**	**75**	**20**	**90**	**112,5**
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Industri Nasional (SIINAS)	**persentase izin usaha industri yang diproses dan ditindaklanjuti**	**80**	**%**	**55**	**20**	**15**	**75**	**20**	**90**	**112,5**

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat Daerah) s.d tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) / 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) / 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	5 dokumen	1	0	0	0	0	1	20,00
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase penggunaan SIINas oleh pemangku kepentingan khususnya pelaku usaha industri**	**100 %**	**55**	**25**	**15**	**60**	**20**	**90**	**90**
3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota**	**Persentase ketersediaan informasi industri daerah**	**100 %**	**55**	**25**	**15**	**60**	**20**	**90**	**90**

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat Daerah) s.d tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) / 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) / 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.042.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	5 dokumen	2	1	0	0	1	3	60,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu dapat diukur berdasarkan indikator kinerja utama yang sudah ditentukan. Hal ini tersaji pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	SATUAN	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase pasar rakyat berstandar SNI			%	50	55	60	65	30	40	50	55	
2	Persentase produk unggulan yang bernilai ekspor			%	30	35	35	40	0	0	10	20	
3	Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri			%	30	40	45	50	25	30	35	40	
4	Persentase UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang sesuai dengan standar kemetrologian			%	60	65	70	75	40	50	55	65	
5	Jumlah sentra IKM			sentra	0	0	1	0	0	0	1	0	
6	Persentase peningkatan Jumlah pelaku usaha industri yang didukung oleh industri kreatif			%	45	50	55	60	25	30	35	40	
7	Persentase peningkatan pelaku usaha IKM (kewirausahaan)			%	50	55	60	65	30	35	40	45	
8	Persentase produk IKM yang bersertifikat (SNI, MUI, BPOM, P-IRT)			%	50	55	60	65	30	35	40	45	

Dari tabel diatas, pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu diukur berdasarkan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Pasar Rakyat Berstandar SNI

Sampai dengan tahun 2024, dari 11 unit pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, ada sebanyak 5 unit pasar yang sudah dilakukan revitalisasi dan/atau dilakukan pemeliharaan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasar	Jenis Pelaksanaan
1	Pasar Glugur Rantauprapat	Rehabilitasi
2	Pasar Aek Nabara	Revitalisasi
3	Pasar Sei Berombang	Rehabilitasi
4	Pasar Sioldengan	Pembangunan Baru
5	Pasar Negeri Lama	Revitalisasi

Dengan demikian realisasi kinerja sasaran ini adalah sebesar 45,45%. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan revitalisasi pasar rakyat perlu ditingkatkan ke depannya agar terjadi pemerataan pembangunan secara fisik khususnya pasar rakyat.

2. Persentase produk unggulan yang bernilai ekspor

Sesuai dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 530/255/Dag.Ind/2023 tentang Perubahan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 530/175/Dag.Ind/2017 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, jumlah produk unggulan daerah ada sebanyak 9 produk. Produk tersebut adalah batik, tenun, kerajinan lidi kelapa sawit, kerajinan bambu, handicraft, terasi, stik ikan terubuk, kue jahe dan sirup nenas. Seluruhnya belum ada yang dapat diekspor ke luar negeri, sehingga ini menjadi tantangan yang harus ditingkatkan ke depan.

3. Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri adalah upaya strategis yang dilakukan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk lebih mengutamakan serta mengkonsumsi barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dibandingkan produk impor. Tujuannya adalah untuk memperkuat perekonomian dalam negeri, meningkatkan kapasitas industri dalam negeri, meningkatkan daya saing produk lokal serta menciptakan lapangan kerja. Realisasi indikator ini diukur dengan membandingkan nilai produk dalam negeri dalam pengadaan barang jasa dengan total pengadaan barang jasa pada tahun berkenaan yang diambil dari Laporan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam empat tahun terakhir, capaian indikator ini mengalami peningkatan dari 20,86% menjadi 66,06%. Capaian ini mengindikasikan penggunaan produk dalam negeri semakin baik, namun masih terdapat ruang perbaikan. Karenanya perlu dorongan lebih lanjut melalui kebijakan, peningkatan sosialiasi dan promosi serta peningkatan kualitas produk dalam negeri.

4. Persentase UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapan Lainnya) Yang sesuai dengan standar kemetrologian.

Dalam empat tahun terakhir, Persentase UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapan Lainnya) Yang sesuai dengan standar kemetrologian cenderung meningkat dari 54,38% menjadi 59,28 %. Dalam hal ini yang dimaksud sesuai dengan standar kemetrologian adalah alat UTTP yang sudah ditera dan/atau ditera ulang dan bertanda sah yang berlaku. Meskipun ada tren kenaikan, namun capaian tersebut masih dalam kategori sedang karena berada di rentang 50 – 80%. Hal ini menunjukkan masih terdapat sebagian alat ukur takar timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang belum sesuai standar atau belum ditera. Karenanya kegiatan tera dan tera ulang perlu ditingkatkan secara masif, sosialisasi kemetrologian dan penegakan hukum di bidang kemetrologian.

5. Persentase peningkatan jumlah pelaku industri yang didukung oleh industri kreatif

Dalam hal ini yang dimaksud pelaku usaha industri yang didukung oleh industri kreatif adalah pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang telah menggunakan teknologi tepat guna. Realisasi capaian indikator ini diformulasikan dengan menghitung proporsi jumlah pelaku usaha yang telah menggunakan teknologi tepat guna terhadap jumlah seluruh industri kecil menengah yang ada dan terdata.

Dalam empat tahun terakhir, capaian kinerja indikator ini mengalami cenderung naik dari 10% di tahun 2021 menjadi 46,88% di tahun 2024. Hal ini menggambarkan mulai berkembangnya industri yang menggunakan teknilogi tepat guna namun masih membutuhkan dukungan modal dan akses pemasaran.

6. Persentase peningkatan pelaku usaha IKM (kewirausahaan)

Dalam hal ini yang dimaksud pelaku usaha IKM (kewirausahaan) adalah wirausaha baru di sektor industri kecil dan menengah (IKM). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja indikator ini cenderung naik dari 10% menjadi 39,15%. Hal ini menunjukkan mulai bertumbuhnya wirausaha baru di sektor industri kecil dan menengah (IKM), namun masih perlu intervensi yang lebih kuat seperti pemberian insentif, pendampingan intensif, promosi usaha dan peningkatan kualitas produk.

7. Persentase peningkatan produk IKM yang bersertifikat (SNI, MUI, BPOM, P-IRT)

Dalam hal ini, produk IKM yang bersertifikat adalah produk IKM yang sudah dinilai dan disertifikasi dari instansi yang berwenang seperti sertifikasi SNI, Sertifikat Halal MUI, Sertifikat BPOM dan Sertifikat P-IRT. Dari hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja indikator ini baru dapat terealisasi pada tahun 2024 karena adanya keterbatasan anggaran. Pada tahun 2024 ada 14 produk IKM yang telah difasilitasi dalam perolehan sertifikat BPOM. Sertifikat BPOM merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan BPOM Indonesia untuk menyatakan bahwa suatu produk baik makanan, minuman, obat, kosmetik atau suplemen telah lulus uji keamanan, mutu dan manfaat, serta boleh diedarkan di pasar Indonesia. Namun jumlah ini masih sangat sedikit dibandingkan jumlah

IKM yang ada. Karenanya perlu strategi percepatan misalnya dengan peningkatan subsidi biaya sertifikasi produk, pendampingan teknis, dan peningkatan literasi standar mutu produk IKM.

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu, diantaranya :

1. Urusan Perindustrian

a. Lemahnya daya saing Industri Kecil Menengah yang dapat disebabkan karena keterbatasannya peralatan yang digunakan, terbatasnya kemampuan dan keterampilan industri, serta kurangnya promosi dan jejaring produk IKM
b. Pengembangan produk unggulan IKM kurang optimal
c. Minimnya pemanfaatan teknologi bagi pengembangan usaha industri kecil dan menengah.
d. Belum optimalnya fasilitasi yang diberikan kepada industri kecil baik fasilitasi kemitraan, promosi dan pemasaran maupun pendampingan.
e. Rendahnya validasi serta pemutakhiran data direktori, profil dan potensi industri.
f. Belum optimalnya pengembangan industri berbasis sentra dan klaster.
g. Pengembangan kualitas produk IKM dan kemasan yang belum maksimal.
h. Lemahnya penguasaan dan pengembangan desain produk unggulan daerah.
i. Belum optimalnya pengembangan industri dalam meningkatkan nilai tambah produk berbasis agro (pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan)
j. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data dan informasi industri
k. Belum rampungnya Rencana pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Labuhanbatu

2. Urusan Perdagangan

a. Masih banyaknya pelaku usaha yang tidak tertib ukur dan merugikan konsumen
b. Minimnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera ulang terhadap alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)

c. Belum optimalnya pengawasan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)
d. Minimnya tenaga penera dan pengawas kemetrologian
e. Perlunya menjaga stabilisasi harga barang pokok strategis dan barang penting lainnya yang dapat disebabkan oleh disparitas dan fluktuasi harga bahan pokok yang tinggi
f. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat dan sarana perdagangan;
g. Banyaknya produk-produk beredar di pasaran yang tidak memenuhi kaidah standarisasi khususnya barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan data rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan tahun 2025

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah**	**Labuhan batu**	**100**	**%**	**5,785,945,140**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah**	**Labuhan batu**	**100**	**%**	**6,205,909,191**	
		Nilai AKIP OPD	**Labuhan batu**	**70**				**Nilai AKIP OPD**	**Labuhan batu**	**70**			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Labuhan batu**	**100**	**%**	**4,078,602,668**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Labuhan batu**	**100**	**%**	**4,584,467,594**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Labuhan batu	32	orang / bulan	3,823,122,668	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Labuhan batu	32	orang / bulan	4,328,987,594	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Labuhan batu	12	dokumen	255,480,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Labuhan batu	12	dokumen	255,480,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah**	**Labuhan batu**	**100**	**%**	**70,248,875**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah**	**Labuhan batu**	**100**	**%**	**36,070,000**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Labuhan batu	1	laporan	70,248,875	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Labuhan batu	1	laporan	36,070,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah**	**Labuhan batu**	**100**	**%**	**604,517,322**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah**	**Labuhan batu**	**100**	**%**	**552,795,322**	

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Labuhan batu	1	paket	6,473,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Labuhan batu	1	paket	6,473,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Labuhan batu	1	paket	142,150,122	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Labuhan batu	1	paket	142,150,122	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Labuhan batu	1	paket	78,764,200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Labuhan batu	1	paket	78,764,200	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Labuhan batu	20	dokumen	15,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Labuhan batu	20	dokumen	15,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Labuhan batu	2	laporan	17,940,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Labuhan batu	2	laporan	17,940,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Labuhan batu	1	laporan	344,190,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Labuhan batu	1	laporan	292,468,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Labuhan batu**	**100**	**%**	**821,076,275**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Labuhan batu**	**100**	**%**	**821,076,275**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Labuhan batu	12	laporan	19,200,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Labuhan batu	12	laporan	19,200,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Labuhan batu	12	laporan	537,175,475	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Labuhan batu	12	laporan	537,175,475	

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
		dan Listrik yang Disediakan						Daya Air dan Listrik yang Disediakan					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Labuhan batu	12	laporan	264,700,800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Labuhan batu	12	laporan	264,700,800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Labuhan batu**	**100**	**%**	**211,500,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Labuhan batu**	**100**	**%**	**211,500,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Labuhan batu	20	unit	211,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Labuhan batu	20	unit	211,500,000	
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya**	**Labuhan batu**	**25**	**%**	**2,841,815,399**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya**	**Labuhan batu**	**25**	**%**	**2,069,903,745**	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Persentase sarana dan prasarana pasar rakyat yang baik dan representatif**	**Labuhan batu**	**70**	**%**	**2,334,022,340**	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase sarana dan prasarana pasar rakyat yang baik dan representatif**	**Labuhan batu**	**70**	**%**	**1,712,914,420**	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Labuhan batu	11	unit	2,334,022,340	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Labuhan batu	11	unit	1,712,914,420	

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	**Tingkat kepatuhan pedagang dan pengelola pasar rakyat terhadap standar operasional pengelolaan pasar dan regulasi perdagangan**	**Labuhan batu**	**85**	**%**	**507,793,059**	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	**Tingkat kepatuhan pedagang dan pengelola pasar rakyat terhadap standar operasional pengelolaan pasar dan regulasi perdagangan**	**Labuhan batu**	**85**	**%**	**356,989,325**	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Labuhan batu	5	dokumen	507,793,059	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Labuhan batu	5	dokumen	356,989,325	
3	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	**Labuhan batu**	**94**	**%**	**131,506,000**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	**Labuhan batu**	**94**	**%**	**40,169,000**	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**indeks perubahan harga barang kebutuhan pokok**	**Labuhan batu**	**5**	**%**	**79,012,000**	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**indeks perubahan harga barang kebutuhan pokok**	**Labuhan batu**	**5**	**%**	**40,169,000**	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Labuhan batu	5	laporan	79,012,000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Labuhan batu	5	laporan	40,169,000	

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penyimpangan atau pelanggaran atas ketersediaan, distribusi dan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi yang terdeteksi dan ditindaklanjuti**	**Labuhan batu**	**85**	**%**	**52,494,000**	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyimpangan atau pelanggaran atas ketersediaan, distribusi dan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi yang terdeteksi dan ditindaklanjuti**	**Labuhan batu**	**85**	**%**	**-**	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Labuhan batu	5	laporan	52,494,000.00	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Labuhan batu	5	laporan	0	
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Nilai Ekspor Barang**	**Labuhan batu**	**20**	**%**	**114,849,600**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Nilai Ekspor Barang**	**Labuhan batu**	**20**	**%**	**28,517,000**	
	Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	**Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam kegiatan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan**	**Labuhan batu**	**40**	**pelaku usaha**	**114,849,600**	**Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/kota**	**Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam kegiatan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan**	**Labuhan batu**	**40**	**pelaku usaha**	**28,517,000**	
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Labuhan batu	15	pelaku usaha	0	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Labuhan batu	15	pelaku usaha	-	
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Labuhan batu	20	pelaku usaha	114,849,600	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Labuhan batu	20	pelaku usaha	28,517,000	
5	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen**	**Labuhan batu**	**100**	**%**	**270,543,100**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen**	**Labuhan batu**	**100**	**%**	**128,186,100**	

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Persentase temuan penyimpangan atau pelanggaran atas penggunaan alat ukur takaran timbangan dan perlengkapan ukur yang tidak memenuhi standar yang ditindaklanjuti**	**Labuhan batu**	**85**	**%**	**270,543,100**	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Persentase temuan penyimpangan atau pelanggaran atas penggunaan alat ukur takaran timbangan dan perlengkapan ukur yang tidak memenuhi standar yang ditindaklanjuti**	**Labuhan batu**	**85**	**%**	**128,186,100**	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Labuhan batu	1,200	unit	191,995,100	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Labuhan batu	1,200	unit	128,186,100	
	Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Labuhan batu	50	pelaku usaha	78,548,000	Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Labuhan batu	50	pelaku usaha	-	
6	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan**	**Labuhan batu**	**30**	**%**	**528,463,428**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan**	**Labuhan batu**	**30**	**%**	**358,758,878**	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**persentase peningkatan penjualan produk lokal unggulan daerah yang dipromosikan**	**Labuhan batu**	**25**	**%**	**528,463,428**	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**persentase peningkatan penjualan produk lokal unggulan daerah yang dipromosikan**	**Labuhan batu**	**25**	**%**	**358,758,878**	
	Pelaksanaan Promosi penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Labuhan batu	20	UMKM	528,463,428	Pelaksanaan Promosi penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Labuhan batu	20	UMKM	358,758,878	

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
7	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri**	**Labuhan batu**	**8**	**%**	**550,000,000**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri**	**Labuhan batu**	**8**	**%**	**305,912,000**	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Labuhan batu**	**5**	**dokumen**	**550,000,000**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Labuhan batu**	**5**	**dokumen**	**305,912,000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Labuhan batu	5	dokumen	550,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Labuhan batu	5	dokumen	305,912,000	
8	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini**	**Labuhan batu**	**40**	**%**	**50,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini**	**Labuhan batu**	**40**	**%**	**9,000,000**	
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	**Persentase ketersediaan informasi industri daerah**	**Labuhan batu**	**80**	**%**	**50,000,000**	**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota**	**Persentase ketersediaan informasi industri daerah**	**Labuhan batu**	**80**	**%**	**9,000,000**	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam	Labuhan batu	1	dokumen	50,000,000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Labuhan batu	1	dokumen	9,000,000	

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Penyampaian Data ke SIINas	Penyampaian Data ke SIINas											
						10,273,122,667						**9,146,355,914**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan rencana kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu membuka akses bagi para pemangku kepentingan untuk berperan serta memberikan usulan pembangunan sesuai urusan perindustrian dan urusan perdagangan yang selaras dengan rumusan Renja melalui Musrenbang Kecamatan dan Pokok Pikir DPRD, namun pada tahun 2025 tidak ada usulan yang masuk.

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 harus memperhatikan keselarasan dengan kebijakan dan program prioritas nasional sebagai bagian dari upaya mensinergikan program pusat dan daerah.

Kebijakan nasional di bidang perdagangan dan perindustrian mengacu pada arah kebijakan sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dengan ringkasan sebagai berikut :

3.1.1. Arah Kebijakan Kementerian Perdagangan

1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor;
2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional;
3. Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok;
4. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok;
5. Peningkatan pemberdayaan konsumen;
6. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur;
7. Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri;
8. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK);
9. Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
10. Penguatan Pelayanan Publik yang Prima;
11. Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian;
12. Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi.

Dari 12 (dua belas) arah kebijakan pembangunan perdagangan tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu fokus pada Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok (3), Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok (4), Peningkatan pemberdayaan konsumen (5), Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur (6) dan Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri (7)

3.1.2. Arah Kebijakan Kementerian Perindustrian

1) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri
2) Kebijakan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Industri
3) Kebijakan Pemberdayaan Industri
4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri
5) Kebijakan Fasilitas Fiskal Dan Nonfiskal
6) Kebijakan Reformasi Birokrasi

Dari 6 (enam) arah kebijakan pembangunan perdagangan tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu fokus pada Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri (1), Kebijakan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Industri (2), dan Kebijakan Pemberdayaan Industri (3).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu didasarkan atas rumusan isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra PD tahun 2025-2029.

Dengan mengacu pada Misi ke-7 RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029 yaitu “**Pengembangan inovasi daerah dalam mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata**”, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

3.2.1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu adalah : **‘’Meningkatnya nilai tambah perdagangan dan daya saing industri”**

3.2.2. Sasaran

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 mengacu pada sasaran strategis yang akan dicapai yang diukur dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1. Sasaran Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	17,96%
		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	20%
		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	65%
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	60%
2	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	32,53%
		Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	7,5%
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan layanan publik	Nilai SAKIP	70

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rencana kerja (Renja) perubahan ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu direncanakan melaksanakan 8 program, 13 kegiatan dan 21 subkegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Outcome : Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi

Indikator Kinerja : Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya

1.1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

1.1.2. Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

1.2. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya

1.2.1. Subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

2. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Outcome : Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Indikator Kinerja : Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

2.1. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

2.1.1. Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Outcome : Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor

Indikator Kinerja : Persentase peningkatan nilai ekspor barang

3.1. Kegiatan Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/kota

3.1.1. Subkegiatan Pameran Dagang Lokal

4. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Outcome : Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk

Indikator Kinerja : Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen

4.1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

4.1.1. Subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

5. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Outcome : Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri

Indikator Kinerja : Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan

5.1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

5.1.1. Subkegiatan Pelaksanaan Promosi penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Outcome : Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri

Indikator Kinerja : Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri

6.1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota

6.1.1. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

7. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Outcome : Meningkatnya pemanfaatan informasi industri

Indikator Kinerja : Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini

7.1. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota

7.1.1. Subkegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

8. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Outcome : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah

Indikator Kinerja : Nilai SAKIP OPD

8.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

8.1.1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

8.1.2. Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

8.2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

8.2.1. Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

8.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

8.3.1. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8.3.2. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

8.3.3. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

8.3.4. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

8.3.5. Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

8.3.6. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

8.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8.4.1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

8.4.2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

8.4.3. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8.5.1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah disusun berdasarkan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat memuat rincian program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target kinerja beserta kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Rumusan perubahan rencana kerja dan pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut ini

Tabel 4.1. Perubahan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Nilai AKIP OPD**	**100 % 70**	**100 % 70**	**6.896.449.877**	**5.785.945.140**	**6.205.909.191**	**-826.616.961**	**100 % 72**	**6.021.000.000**
2.07.01. 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**100 %**	**5.198.899.877**	**4.078.602.668**	**4.584.467.594**	**-614.432.283**	**100 %**	**4.287.000.000**
2.07.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang / bulan	32 orang / bulan	4.911.899.877	3.823.122.668	4.328.987.594	-582.912.283	32 orang / bulan	4.000.000.000
2.07.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	287.000.000	255.480.000	255.480.000	-31.520.000	12 dokumen	287.000.000
2.07.01. 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah**	**100 %**	**100 %**	**62.350.000**	**70.248.875**	**36.070.000**	**-26.280.000**	**100 %**	**10.000.000**
2.07.01. 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan	1 laporan	1 laporan	62.350.000	70.248.875	36.070.000	-26.280.000	1 laporan	10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Barang Milik Daerah pada SKPD								
2.07.01. 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**	**100 %**	**733.200.000**	**604.517.322**	**552.795.322**	**-180.404.678**	**100 %**	**662.000.000**
2.07.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	20.000.000	6.473.000	6.473.000	-13.527.000	1 paket	12.000.000
2.07.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	215.000.000	142.150.122	142.150.122	-72.849.878	1 paket	180.000.000
2.07.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	64.600.000	78.764.200	78.764.200	14.164.200	1 paket	80.000.000
2.07.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 dokumen	20 dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	20 dokumen	15.000.000
2.07.01. 2.06.067	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 laporan	2 laporan	30.000.000	17.940.000	17.940.000	-12.060.000	2 laporan	25.000.000
2.07.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	388.600.000	344.190.000	292.468.000	-96.132.000	1 laporan	350.000.000
2.07.01. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Persentase pemenuhan layanan Jasa**	**100 %**	**100 %**	**685.000.000**	**821.076.275**	**821.076.275**	**136.076.275**	**100 %**	**842.000.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemerintahan Daerah	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
2.07.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	15.000.000	19.200.000	19.200.000	4.200.000	12 laporan	22.000.000
2.07.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	400.000.000	537.175.475	537.175.475	137.175.475	12 laporan	550.000.000
2.07.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	270.000.000	264.700.800	264.700.800	-5.299.200	12 laporan	270.000.000
2.07.01. 2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**100 %**	**217.000.000**	**211.500.000**	**211.500.000**	**-5.500.000**	**100 %**	**220.000.000**
2.07.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	20 unit	217.000.000	211.500.000	211.500.000	-5.500.000	20 unit	220.000.000
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA**	**Persentase Sarana Perdagangan**	**25 %**	**25 %**	**2.792.637.500**	**2.841.815.399**	**2.069.903.745**	**-722.733.755**	**30 %**	**2.700.000.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**yang Ditingkatkan Kualitasnya**								
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase sarana dan prasarana pasar rakyat yang baik dan representatif**	**70 %**	**70 %**	**2.392.637.500**	**2.334.022.340**	**1.712.914.420**	**-679.723.080**	**75 %**	**2.000.000.000**
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	11 unit	11 unit	2.392.637.500	2.334.022.340	1.712.914.420	-679.723.080	11 unit	2.000.000.000
3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	**Tingkat kepatuhan pedagang dan pengelola pasar rakyat terhadap standar operasional pengelolaan pasar dan regulasi perdagangan**	**85 %**	**85 %**	**400.000.000**	**507.793.059**	**356.989.325**	**-43.010.675**	**90 %**	**700.000.000**
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 dokumen	5 dokumen	400.000.000	507.793.059	356.989.325	-43.010.675	5 dokumen	700.000.000
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	**94 %**	**94 %**	**82.800.000**	**131.506.000**	**40.169.000**	**-42.631.000**	**95 %**	**145.000.000**
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok**	**indeks perubahan harga barang kebutuhan pokok**	**5 %**	**5 %**	**52.800.000**	**79.012.000**	**40.169.000**	**-12.631.000**	**5 %**	**70.000.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota									
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 laporan	5 laporan	52.800.000	79.012.000	40.169.000	-12.631.000	5 laporan	70.000.000
3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyimpangan atau pelanggaran atas ketersediaan, distribusi dan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi yang terdeteksi dan ditindaklanjuti**	**85 %**	**85 %**	**30.000.000**	**52.494.000**	**0**	**-30.000.000**	**90 %**	**75.000.000**
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5 laporan	5 laporan	30.000.000,00	52.494.000,00	0,00	-30.000.000	5 laporan	75.000.000
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Nilai Ekspor Barang**	**20 %**	**20 %**	**401.650.000**	**114.849.600**	**28.517.000**	**-373.133.000**	**25 %**	**500.000.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/kota**	**Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam kegiatan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan**	**40 pelaku usaha**	**40 pelaku usaha**	**401.650.000**	**114.849.600**	**28.517.000**	**-373.133.000**	**40 pelaku usaha**	**500.000.000**
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	15 pelaku usaha	15 pelaku usaha	200.000.000	0	0	-200.000.000	15 pelaku usaha	300.000.000
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	20 pelaku usaha	20 pelaku usaha	201.650.000	114.849.600	28.517.000	-173.133.000	20 pelaku usaha	200.000.000
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen**	**100 %**	**100 %**	**90.000.000**	**270.543.100**	**128.186.100**	**38.186.100**	**100 %**	**270.000.000**
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Persentase temuan penyimpangan atau pelanggaran atas penggunaan alat ukur takaran timbangan dan perlengkapan ukur yang tidak memenuhi standar yang ditindaklanjuti**	**85 %**	**85 %**	**90.000.000**	**270.543.100**	**128.186.100**	**38.186.100**	**90 %**	**270.000.000**
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1.200 unit	1.200 unit	40.000.000	191.995.100	128.186.100	88.186.100	1.200 unit	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.30.06.2.01.02	Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50 pelaku usaha	50 pelaku usaha	50.000.000	78.548.000	0	-50.000.000	50 pelaku usaha	70.000.000
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan**	**30 %**	**30 %**	**70.000.000**	**528.463.428**	**358.758.878**	**288.758.878**	**35 %**	**250.000.000**
3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**persentase peningkatan penjualan produk lokal unggulan daerah yang dipromosikan**	**25 %**	**25 %**	**70.000.000**	**528.463.428**	**358.758.878**	**288.758.878**	**30 %**	**250.000.000**
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UMKM	20 UMKM	70.000.000	528.463.428	358.758.878	288.758.878	20 UMKM	250.000.000
3.31.02.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri**	**8 %**	**8 %**	**333.000.000**	**550.000.000**	**305.912.000**	**-27.088.000**	**9 %**	**700.000.000**
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**5 dokumen**	**5 dokumen**	**333.000.000**	**550.000.000**	**305.912.000**	**-27.088.000**	**5 dokumen**	**700.000.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.31.02.2.01.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 dokumen	5 dokumen	333.000.000	550.000.000	305.912.000	-27.088.000	5 dokumen	700.000.000
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini**	**40 %**	**40 %**	**50.000.000**	**50.000.000**	**9.000.000**	**-41.000.000**	**50 %**	**70.000.000**
3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota**	**Persentase ketersediaan informasi industri daerah**	**80 %**	**80 %**	**50.000.000**	**50.000.000**	**9.000.000**	**-41.000.000**	**85 %**	**70.000.000**
3.31.042.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	50.000.000	9.000.000	-41.000.000	1 dokumen	70.000.000
					10.716.537.377	**10.273.122.667**	**9.146.355.914**	**-1.570.181.463**		**10.656.000.000**

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 disusun dengan tujuan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Di samping itu Renja ini dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahun 2025.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan rencana kerja (Renja) antara lain :

1. Melakukan identifikasi atau pemetaan terhadap kegiatan yang memiliki dampak besar atau urgen untuk dilaksanakan. Kegiatan yang menyentuh kepentingan publik langsung atau yang bersifat strategis sebaiknya diprioritaskan
2. Jika anggaran terbatas, maka anggaran sebaiknya difokuskan pada kegiatan prioritas, sementara kegiatan yang kurang esensial atau bisa ditunda dapat dialokasikan anggarannya
3. Memastikan setiap anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efisien, mengurangi pemborosan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan rencana

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025, perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Renja perangkat daerah harus selaras dengan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Taun 2025-2029 yang telah disusun untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan mendukung visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Renja harus melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang disusun mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka.
3. Program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja harus diprioritaskan berdasarkan urgensi dan relevansinya dengan tujuan pembangunan daerah, serta kemampuan anggaran yang tersedia.
4. Setiap program atau kegiatan dalam Renja harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur agar dapat dievaluasi efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
5. Pelaksanaan Renja harus didukung dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang teratur agar dapat memantau perkembangan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
6. Pelaksanaan Renja harus melibatkan koordinasi yang baik antara berbagai perangkat daerah untuk mencapai hasil yang optimal, menghindari tumpang tindih program, dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien.
7. Program dan kegiatan yang direncanakan juga harus memperhatikan kebijakan, peraturan, dan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Rantauprapat, 8 July 2025

Kepala Dinas
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Labuhanbatu

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Chairuddin Nasution, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197207181993081001